



**PENGARUH TINGKAT KEMISKINAN DAN PENDAPATAN PERKAPITA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH SERTA OPINI AUDIT
DENGAN TINGKAT KEPERCAYAAN MASYARAKAT SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING TERHADAP PENERIMAAN PAJAK
DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SE-INDONESIA**

*The Effect Of Poverty Levels And Perkapita Income On Regional Tax Revenue And
Audit Opinion With Community Confidence As Intervening Variables Towards
Indonesian Regional Governments*

Muh. Alwi¹⁾, Muhammad Su'un²⁾, Amiruddin³⁾

Email : inflasi.boy@gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar
Jl. Urip Sumoharjo KM.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Abstract

This study aims: To investigate whether the Poverty Level Affects Provincial Tax Revenues in Indonesia, to test whether per capita income affects provincial tax revenue in Indonesia, to test whether the Audit Opinion with Intervention Variables, Public Trust Level, to test whether the Audit Opinion affects Provincial Tax Revenues in Indonesia. This academic study typically uses secondary data with time series data for the period 2010, 2012, 2014, 2016, and 2018. The data analysis technique typically uses the stimulus equation with the path analysis estimation technique. The Statistical Package for the Social Science application program (SPSS) version 23 is typically used to carefully help carefully analyze the data typically used in this study. The results showed that: The level of poverty has a significant effect on Provincial Tax Revenues in Indonesia, Per capita income has no significant impact on Provincial Tax Revenues in Indonesia, Audit Opinion with Intervening Variables Community Trust Level typically has a significant effect on Provincial Tax Revenues in Indonesia.

Keywords: Poverty Level, Per capita Income, Audit Opinion, Public Trust Level, and Provincial Tax Revenues in Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: Untuk menguji apakah Tingkat Kemiskinan Mempengaruhi Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia, Untuk menguji apakah pendapatan Per kapita berpengaruh terhadap penerimaan pajak provinsi di Indonesia, Untuk menguji apakah Opini Audit dengan Variabel Intervensi, Tingkat Kepercayaan Publik, Untuk menguji apakah Opini Audit mempengaruhi Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan data time series periode 2010, 2012, 2014, 2016, dan 2018. Teknik analisis data menggunakan persamaan stimulus dengan teknik estimasi analisis jalur. Paket Statistik untuk program aplikasi Ilmu Sosial (SPSS) versi 23 digunakan untuk membantu menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Tingkat kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia, Pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia, Audit Opinion dengan Intervening Variables Community Trust Level berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia Indonesia.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Per kapita, Opini Audit, Tingkat Kepercayaan Masyarakat, dan Penerimaan Pajak Provinsi di Indonesia

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan kebutuhan yang besar dalam pembangunan, tentu membutuhkan sumber pendanaan yang besar pula. sumber pendanaan tersebut dapat bersumber dari pengelolaan sumberdaya alam melihat kondisi geografis Indonesia yang begitu strategis, namun kondisi sumberdaya manusia yang belum siap mengelola secara mandiri maka potensi sumberdaya alam tersebut belum maksimal maka Negara harus memaksimalkan potensi lain seperti Pajak.

Dalam era globalisasi sekarang ini, penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan pengelolaan keuangan yang sehat. Amanat Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, kewenangan yang luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan ini, pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi wewenang dan masyarakat. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi, efisiensi dan efektivitas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin adanya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan ini, maka diperlukan suatu sistem yang tepat dan benar-benar diterapkan dalam instansi tersebut.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014, secara jelas disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 23 Tahun 2014 pasal 1, huruf e), Hal ini berarti otonomi menjadi hal yang sangat penting bagi daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kota dan kabupaten didasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang sangat luas, nyata dan bertanggungjawab. Otonomi mencakup pula kewenangan yang penuh dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan dan evaluasi. Konsekuensi logis dari desentralisasi tersebut, akan ada pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dalam menggunakan dana, baik yang berasal dari pemerintah pusat (sesuai dengan urusan yang telah diserahkan) maupun dana yang berasal dari pemerintah daerah sendiri. Untuk pengelolaan dana yang cukup besar ini diperlukan juga peraturan pelaksana yang lebih kongkret dan lebih jelas, seperti Peraturan Pemerintah.

Implikasi dari otonomi daerah adalah pengelolaan keuangan secara mandiri dalam mengelola keuangannya sendiri melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan APBD diawali dengan membuat kesepakatan antara eksekutif (Pemerintah Daerah) dan legislatif (DPRD) tentang kebijakan umum APBD dan Prioritas Anggaran yang akan menjadi pedoman untuk penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja. Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan kebijakan umum APBD dan Prioritas anggaran yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama sama sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Haryanto dkk, 2007).

(Dian 2016) Dari hasil analisa dan pembahasan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Provinsi Bengkulu dapat disimpulkan bahwa pertama, hasil penelitian membuktikan bahwa pendapatan per kapita (PDRB) berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa meningkatnya PDRB akan berpengaruh meningkatkan penerimaan pajak daerah. Kedua, hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh positif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa banyaknya jumlah penduduk belum tentu akan meningkatkan pajak daerah karena tidak semua penduduk pada usia produktif 15-64 tahun memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap, terutama dalam ruang lingkup pembayaran pajak daerah. Dengan kata lain, penduduk memiliki peran tidak langsung terhadap peningkatan pajak daerah kecuali penduduk tersebut berada dalam ruang lingkup sebagai wajib pajak

penyetor pajak daerah. Ketiga, hasil penelitian ini membuktikan bahwa inflasi tidak berpengaruh negatif terhadap pajak daerah di Provinsi Bengkulu. Hal ini berarti bahwa dampak yang ditimbulkan inflasi di provinsi Bengkulu adalah positif dan dapat membantu meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan syarat inflasi yang terjadi masih ringan di bawah 10 persen, dengan tingkat inflasi yang terjadi diasumsikan sama untuk seluruh kabupaten dan kota.

Hasi pemeriksaan BPK Terhadap LKPD akan berujung pada pemberian Opini seperti yang diutarakan oleh (Sucahyo Heriningsih dan Marita 2013) menggambarkan tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah yang menjadi kebutuhan penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, sehingga untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat penting untuk selalu dilakukan audit atas LKPD oleh pihak independent (BPK RI). Laporan hasil audit oleh BPK RI dapat berupa opini auditor, dimana terdapat empat jenis pendapat auditor (BPK).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2019 mencapai 25,14 juta orang. Dibandingkan September 2018, jumlah penduduk miskin menurun 529,9 ribu orang. Sementara jika dibandingkan dengan Maret 2018, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 805,1 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 tercatat sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode September 2018–Maret 2019, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebesar 136,5 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan turun sebesar 393,4 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan turun dari 6,89 persen menjadi 6,69 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 13,10 persen menjadi 12,85 persen.

Opini Audit Menurut BPK dalam publikasi Index Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2019 pemerintah daerah DALAM 5 tahun terakhir (2014-2018), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 35 poin persen, yaitu dari 47% pada LKPD Tahun 2014 menjadi 82% pada LKPD Tahun 2018. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini WDP dan TMP mengalami penurunan masing-masing sebesar 30 poin persen (dari 46% menjadi 16%) dan 4 poin persen (dari 6% menjadi 2%). Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan atau penurunan opini WTP dari tahun 2017. Kenaikan opini tersebut terjadi pada pemerintah kabupaten dari 298 LKPD (72%) menjadi 327 LKPD (79%). Begitu pula pada pemerintah kota yang mengalami kenaikan dari 80 LKPD (86%) menjadi 84 LKPD (90%). Sementara itu, terjadi penurunan opini WTP pada pemerintah provinsi dari 33 LKPD (97%) menjadi 32 LKPD (94%).

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pendapatan pemerintah provinsi di seluruh Indonesia dari tahun 2014-2017 terus mengalami peningkatan, dengan total pendapatan 233,28 triliun rupiah pada tahun 2014; 242,71 triliun rupiah pada tahun 2015; dan 275,57 triliun rupiah pada tahun 2016 atau mengalami pertumbuhan sebesar 4,04 persen pada tahun 2015 dan 13,54 persen pada tahun 2016. Pada tahun 2017 pendapatan pemerintah provinsi ditargetkan naik 15,83 persen menjadi 319,20 triliun rupiah. Peningkatan pertumbuhan yang cukup signifikan di tahun 2017, lebih disebabkan oleh meningkatnya pendapatan dari dana perimbangan, khususnya komponen Dana Alokasi Umum (DAU) yang naik sebesar 43,80 persen dibanding tahun 2016. Peningkatan ini merupakan salah satu akibat penambahan cadangan DAU yang berasal dari penundaan pembayaran DAU untuk tahun anggaran 2016. Selain itu, peningkatan pendapatan juga didukung oleh meningkatnya target

METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan *sub-subheading*. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil berawalkan huruf kapital, arial 10 bold, rata kiri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif (descriptive reasearch) dan pendekatan konfirmatori (confirmatory research). Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan data-data yang tertera pada tabel, gambar maupun grafik. Sedangkan pendekatan konfirmatori digunakan untuk mengkonfirmasi pengaruh

Penelitian ini dilakukan pada Badan Pusat Statistik, BPK RI dan Economic Co-operation and Development (OECD). dengan Waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian yaitu bulan Februari-September 2020.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data Dokumentasi, yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, IHPS BPK RI dan Economic Co-operation and Development (OECD). Penelitian menggunakan data time series Periode 2010, 2012, 2014, 2016 dan, 2018.

Teknik pengumpulan data (instrumen) yang digunakan adalah pengambilan data Publikasi dari tiga Lembaga yaitu :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) dengan Publikasi data untuk Tingkat Kemiskinan (X1) Pendapatan Perkapita (X2) dan Penerimaan Pajak Daerah (Y)
2. BPK RI dengan Indeks Hsil Pemeriksaan Semester (IHPS) untuk Opini Audit Pemerintah Provinsi (X3),
3. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis publikasi yang berjudul Government at a Glance. dari Publikasi Tersebut akan di ambil data berupa Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z)

Untuk menganalisis Tingkat Kemiskinan dan Pendapatan Perkapita serta Opini Audit melalui Tingkat Kpercayaan Masyarakat terhadap Penerimaan Pajak Derah tingkat Provinsi digunakan alat uji berupa analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji koefisien determinasi, analisis regresi dan pengujian hipotesis. Analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji koefisien determinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Normalitas

Uji normalitas residual digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Sebelum dilakukan uji normalitas residual maka dilakukan uji normalitas data untuk melihat apakah data ini dapat menggunakan uji analisis parametrik atau nonparametrik. Pengujian ini menggunakan metode Kolmogorov Smirnov sebagai berikut :

Tabel. 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		5
Normal Parameters ^a	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.08479921
Most Extreme Differences	Absolute	.339
	Positive	.339
	Negative	-.228
Kolmogorov-Smirnov Z		.758
Asymp. Sig. (2-tailed)		.613

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan table 1 diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,613 lebih besar 0,05 maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan uji normalitas ini artinya Distribusi normal Kolmogorov Smirnov, Dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

2. Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)

a. Persamaan jalur sub struktur pertama :

$$Y = \rho_{YX1}X1 + \rho_{YX2}X2 + \epsilon$$

Uji Kelayakan Model dan Koefisien Determinasi Sub Struktur Pertama. Uji regresi linear berganda (serempak) dimana pengujian ini untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan nilai koefisien regresi terhadap untuk uji kelayakan model. berikut hasil output regresi :

Tabel. 2
Hasil Uji F (ANOVA) Sub Struktur Pertama
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	183.561	3	61.187	2.127	.016 ^a
	Residual	.029	1	.029		
	Total	183.590	4			

Sumber : Data diolah 2020

Hasil output regresi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2 dapat dijelaskan bahwa secara serempak Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Perkapita, dan Opini Audit tidak berpengaruh signifikan secara serempak terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini ditandai dengan membandingkan antara F hitung = 2.127 > F table = 19.00 dan signifikansi 0,016 < 5%, maka H0 diterima berarti nilai koefisien regresi predictor tidak signifikan secara serempak.

Tabel 3
Determinasi (Model Summary) Sub Struktur Pertama

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	1.000 ^a	1.000	.999	.16960	1.000	2127.239	3	1	.016	3.379

a. Predictors: (Constant), x1, x2 , x3

Sumber : Data diolah 2020

Berdasarkan table 3 diketahui nilai koefisien determinasi adalah 1.000 besarnya koefisien determinasi tersebut sama dengan 100%. Angka tersebut mengandung arti bahwa Variabel Tingkat Kemiskinan (X1), Pendapatan Perkapita (X2), dan Opini Audit memiliki hubungan 100% terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y).

Tabel. 4
Hasil Uji T (Coefficients) Sub Struktur Pertama

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Correlations				Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	112.073	7.020		15.964	.040					
	x1	-5.501	.265	-.553	-20.796	.031	-.908	-.999	-.260	.221	4.519
	x2	-.585	.168	-.197	-3.474	.178	.960	-.961	-.043	.049	20.472

Sumber : Data diolah 2020

- 1) Pengaruh Tingkat Kemiskinan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
 Pengujian dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan nilai koefisien regresi. Diperoleh perbandingan nilai t hitung = -20.796. t hitung bernilai negatif hal ini disebabkan oleh nilai rata-rata Tingkat Kemiskinan lebih rendah daripada nilai rata-rata Penerimaan Pajak Daerah. Maka jika menggunakan pengambilan keputusan dalam uji dependent simple t test melalui perbandingan antara nilai t hitung dan t table, Maka t hitung disini berarti positif yakni 20.796.
 Berdasarkan standart pengambilan keputusan Diperoleh perbandingan t hitung = 20.796 > t tabel 19.00 atau nilai signifikansi = 0,031 < alpha = 5%, maka Ho ditolak berarti koefisien regresi predictor Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan secara ngatif terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Besarnya pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Penerimaan Pajak Daerah dilihat pada standardized coefficient (beta) sebesar -0.553 atau -55.3% artinya ketika Tingkat Kemiskinan maka Penerimaan Pajak Daerah akan menurun.
- 2) Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
 Pengujian dilakukan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan nilai koefisien regresi. Diperoleh perbandingan nilai t hitung = -3.474 t hitung bernilai negatif hal ini disebabkan oleh nilai rata-rata Tingkat Kemiskinan lebih rendah daripada nilai rata-rata Penerimaan Pajak Daerah. Maka jika menggunakan pengambilan keputusan dalam uji dependent simple t test melalui perbandingan antara nilai t hitung dan t table, Maka t hitung disini berarti positif yakni 3.474.
 Berdasarkan standart pengambilan keputusan Diperoleh perbandingan t hitung = 3.474 < t tabel 19.00 atau nilai signifikansi = 0,178 > alpha = 5%, maka Ho diterima berarti koefisien regresi predictor Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Besarnya pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah dilihat pada standardized coefficient (beta) sebesar -0.197 atau -19,3% artinya ketika Pendapatan Perkapita meningkat maka tidak berpengaruh Penerimaan Pajak Daerah.

b. Persamaan jalur sub struktur kedua :

$$Z = \rho z X_3 + \varepsilon_1 + \rho Yz + \varepsilon_2$$

Uji Kelayakan Model dan Koefisien Determinasi Sub Struktur Pertama. Uji regresi linear berganda dimana pengujian ini untuk menentukan signifikan atau tidak signifikan nilai koefisien regresi terhadap untuk uji kelayakan model. berikut hasil output regresi :

Tabel. 5
Hasil Uji F (ANOVA) Sub Struktur Ke-dua

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	19.419	1	19.419	10.826	.046 ^a
	Residual	5.381	3	1.794		
	Total	24.800	4			

a. Predictors: (Constant), x3

b. Dependent Variable: z

Hasil output regresi sebagaimana pada Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat. Hal ini ditandai dengan membandingkan antara F hitung = 10.826 > F table = 6.39 dan signifikansi 0,016 < 5%, maka H0 tolak berarti nilai koefisien regresi predictor signifikan.

Tabel. 6
Determinasi (Model Summary) Sub Struktur Kedua

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.885 ^a	.783	.711	1.33928	2.108

a. Predictors: (Constant), x3

b. Dependent Variable: z

Berdasarkan table 6 diketahui nilai koefisien determinasi adalah 0.783 besarnya koefisien determinasi tersebut sama dengan 78,3%. Angka tersebut mengandung arti bahwa Variabel Opini Audit (X3) memiliki hubungan 78,3% terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z), dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.

Tabel. 7
Hasil Uji T (Coefficients) Sub Struktur Kedua

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.719	4.020		1.671	.193
	x3	.637	.194	.885	3.290	.046

a. Dependent Variable: z

Berdasarkan standart pengambilan keputusan Diperoleh perbandingan t hitung = 20.796 > t tabel = 2.131 atau nilai signifikansi = 0,046 < alpha = 5%, maka Ho ditolak berarti koefisien regresi predictor Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat. Besarnya pengaruh Opini Audit Tingkat Kepercayaan Masyarakat dapat dilihat pada standardized coefficient (beta) sebesar 0.888 atau 88.8% artinya ketika Opini Audit meningkat maka Tingkat Kepercayaan Masyarakat akan meningkat.

Tabel. 8
Hasil Uji F (ANOVA) Sub Struktur Kedua

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	148.067	1	148.067	12.505	.038 ^a
	Residual	35.523	3	11.841		
	Total	183.590	4			

a. Predictors: (Constant), z

b. Dependent Variable: y

Hasil output regresi sebagaimana pada Tabel 8 dapat dijelaskan bahwa Tingkat Kepercayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Hal ini ditandai dengan membandingkan antara F hitung = 12.505 > F table = 6.39 dan signifikansi 0,038 < 5%, maka H0 tolak berarti nilai koefisien regresi predictor signifikan.

Tabel. 9
Determinasi (Model Summary) Sub Struktur Kedua

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.898 ^a	.807	.742	3.44106

a. Predictors: (Constant), z

b. Dependent Variable: y

Berdasarkan table 9 diketahui nilai koefisien determinasi adalah 0.807 besarnya koefisien determinasi tersebut sama dengan 80,7%. Angka tersebut mengandung arti bahwa Variabel Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z) memiliki hubungan 80,7%. terhadap Penerimaan Pajak Daerah, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain

Tabel.10
Hasil Uji T (Coefficients) Sub Struktur Kedua

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-20.011	11.357		-1.762	.176
	z	2.051	.580	.898	3.536	.038

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan standart pengambilan keputusan Diperoleh perbandingan t hitung = 3.536 > t tabel = 2.131 atau nilai signifikansi = 0,038 < alpha = 5%, maka Ho ditolak berarti koefisien regresi predictor Tingkat Kepercayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Besarnya pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z) terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat dilihat pada standardized coefficient (beta) sebesar 0.898 atau 89.8% artinya ketika Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z) Penerimaan Pajak Daerah (Y).meningkat.

3. Pengujian Hipotesis

H1 : Tingkat Kemiskinan Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan standart pengambilan keputusan Diperoleh perbandingan t hitung = 20.796 > t tabel 19.00 atau nilai signifikansi = 0,031 < alpha = 5%, maka Ho ditolak berarti koefisien regresi predictor Tingkat Kemiskinan berpengaruh signifikan secara ngatif terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Besarnya pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Penerimaan Pajak Daerah dilihat pada standardized coefficient (beta) sebesar -0.553 atau -55.3% artinya ketika Tingkat Kemiskinan meningkat maka Penerimaan Pajak Daerah akan menurun.

H2 : Pendapatan Perkapita terhadap penerimaan Pajak Daerah

Berdasarkan standart pengambilan keputusan Diperoleh perbandingan t hitung = 3.474 < t tabel 19.00 atau nilai signifikansi = 0,178 > alpha = 5%, maka Ho diterima berarti koefisien regresi predictor Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Besarnya pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah dilihat pada standardized coefficient (beta) sebesar -0.197 atau -19,3% artinya ketika Pendapatan Perkapita meningkat maka tidak berpengaruh Penerimaan Pajak Daerah.

H3 : Opini Audit dimediasi Oleh Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Berdasarkan standart pengambilan keputusan Diperoleh perbandingan t hitung = 20.796 > t tabel = 2.131 atau nilai signifikansi = 0,046 < α = 5%, maka H_0 ditolak berarti koefisien regresi predictor Opini Audit berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat. Besarnya pengaruh Opini Audit Tingkat Kepercayaan Masyarakat dapat dilihat pada standardized coefficient (beta) sebesar 0.888 atau 88.8% artinya ketika Opini Audit meningkat maka Tingkat Kepercayaan Masyarakat akan meningkat. Begitu pula standart pengambilan keputusan Diperoleh perbandingan t hitung = 3.536 > t tabel = 2.131 atau nilai signifikansi = 0,038 < α = 5%, maka H_0 ditolak berarti koefisien regresi predictor Tingkat Kepercayaan Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

Besarnya pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z) terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat dilihat pada standardized coefficient (beta) sebesar 0.898 atau 89.8% artinya ketika Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z) Penerimaan Pajak Daerah (Y).meningkat.

Table 21 memperlihatkan Nilai sebesar 0,797 memiliki arti bahwa pengaruh tidak langsung variabel Opini Audit terhadap Penerimaan Pajak Daerah melalui Tingkat Kepercayaan Masyarakat adalah sebesar 0,797 atau 79,7%.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Opini Audit dimediasi Oleh Tingkat Kepercayaan Masyarakat memiliki pengaruh signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Kemiskinan Berpengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah artinya ketika Tingkat Kemiskinan meningkat maka Penerimaan Pajak Daerah akan menurun begitu pula sebaliknya hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya dan teori yang ada

Sejalan dengan Nadya (2018), Menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa Dalam penelitian ini telah membuktikan dua hal yang juga dapat ditarik sebagai kesimpulan yaitu yang pertama bahwa tingkat kemiskinan dapat memoderasi pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah. Kedua, variabel tingkat kemiskinan juga dapat berfungsi sebagai variabel independen sekaligus.

Iwan Handoko dkk juga menjelaskan bahwa Tingkat kemiskinan secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Terdapatnya pengaruh yang signifikan antara tingkat kemiskinan terhadap penerimaan pajak mengindikasikan bahwasannya penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan di Indonesia. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketika tingkat kemiskinan semakin meningkat maka menunjukkan semakin lemahnya daya belimasyarakat dan akan berdampak terhadap penerimaan pajak daerah.

Menurut Sayogyo dalam Suryawati (2005), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun dan dibagi wilayah pedesaan dan perkotaan.

Penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (2000), sebagai Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitas nya rendah.

Dampak kemiskinan menurut Armelia dkk (2011), Fenomena kemiskinan ternyata tak hanya berdampak buruk pada fisik dan mental anak, tetapi juga mempengaruhi psikis dan perilaku anak. Kemiskinan membuat rumah tangga tak mampu memenuhi kebutuhan pangan anak dengan baik.

Dengan adanya perbandingan hasil penelitian sebelumnya dan Teori kemiskinan maka dapat disimpulkan bahwa Tingkat Kemiskinan di Indonesia memiliki porsi yang besar dalam peningkatan penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia.

2. Pendapatan Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah dalam penelitian ini tidak berpengaruh positif dan signifikan artinya ketika Pendapatan Perkapita meningkat maka tidak berpengaruh Penerimaan Pajak Daerah. Hal tersebut disebabkan wilayah penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian ini meneliti 34 Provinsi dan menggunakan data *time series* dengan periode penelitian 2010, 2012, 2014, 2016 dan 2018. Hal ini menjadi informasi yang menarik dimana Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah tingkat Provinsi.

Hasil empiris penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dian Triastuti dan Dudi Pratomo (2015), Dzingirai Canicio dan Tambudzai Zachary (2014) yang menyatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan Ayugustiningtyas (2003), Nurrohman (2010), dan Haniz (2013) telah membuktikan bahwa pendapatan per kapita memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Begitu pula dalam teori perpajakan (Musgrave, 1989) bahwa penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan per kapita dan jumlah penduduk.

Penelitian ini dengan data *time series* pada periode 2010, 2012, 2014, 2016 dan 2018 dan objek penelitian Provinsi se-Indonesia ternyata menunjukkan bahwa hal yang berbeda dari mayoritas penelitian dan teori yang ada. Maka dapat disimpulkan bahwa walaupun pendapatan masyarakat meningkat tidak sertamerta meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, dan yang menentukan keputusan membayar pajak adalah variabel diluar dari Pendapatan Perkapita.

3. Opini Audit dimediasi Oleh Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Besarnya pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa Opini Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat artinya ketika Opini Audit meningkat maka Tingkat Kepercayaan Masyarakat akan meningkat.

Begitu pula pengaruh Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z) terhadap Penerimaan Pajak Daerah dapat dilihat hasil penelitian ini bahwa Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah artinya ketika Tingkat Kepercayaan Masyarakat (Z) maka Penerimaan Pajak Daerah (Y) meningkat.

Hasil pengujian menggunakan rumus analisis path menunjukkan Opini Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah melalui Tingkat Kepercayaan Masyarakat artinya pengaruh tidak langsung variabel Opini Audit terhadap Penerimaan Pajak Daerah melalui Tingkat Kepercayaan Masyarakat adalah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan.

Hasil penelitian (Yossi 2014) yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan kepada pihak fiskus berpengaruh positif terhadap tindakan tax evasion. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Hammar, Jagers, dan Nordblom (2005) yang menyatakan bahwa ketidakpercayaan kepada politisi berpengaruh positif terhadap tax evasion dan ketidakpercayaan kepada parlemen meningkatkan tax evasion. Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus tergolong dalam kategori tinggi. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat ketidakpercayaan kepada pihak fiskus maka tinggi pula tindakan tax evasion yang dilakukan oleh wajib pajak. Ketidakpercayaan kepada pihak fiskus merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan tindakan tax evasion.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Fuad Rahmany dalam surat kabar elektronik Rimanews, yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang enggan membayar pajak salah satunya dilatarbelakangi oleh kasus penggelapan dana pajak atau dengan kata lain takut jika uang pajaknya dikorupsi oleh wajib pajak.

Dengan adanya ketidakpercayaan Wajib pajak terhadap pihak fiskus maka hal tersebut dapat juga terjadi pada pemerintah daerah, diperlukan penjamin mutu pengelolaan sehingga Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak disalah gunakan.

Opini Audit seperti kita ketahui merupakan bentuk prestasi pemerintah dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Prestasi yang diperlihatkan oleh pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan ketika kepercayaan masyarakat meningkat sesuai dengan Hasil penelitian ini maka Opini Audit melalui Tingkat Kepercayaan Masyarakat dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Provinsi Se-Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Hasil penelitian telah diketahui dan dianalisis bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
2. Hasil penelitian telah diketahui dan dianalisis bahwa Pendapatan Perkapita tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah.
3. Hasil penelitian telah diketahui dan dianalisis bahwa Opini Audit dimediasi Oleh Tingkat Kepercayaan Masyarakat memiliki pengaruh positif dan signifikan Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.

B. Saran

Diharapkan Pemerintah Provinsi se-Indonesia agar meningkatkan Opini Audit yang dapat meningkatkan Tingkat Kepercayaan Masyarakat, meliaht hasil penelitian ini bahwa Opini Audit memiliki Pengaruh Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Melalui Tingkat Kepercayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Nuralifmida, 2012, *Ayu Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Jurnal Akuntansi & Audit, Universitas Sebelas Maret
- Badan Pusat Statistik, 2019, *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha*, ISSN : 2622-805X
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2019, *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019*,
- Badan Pusat Statistik, 2018, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2015-2018*, ISSN : 0216-7905.
- Badan Pusat Statistik, 2017, *Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi 2014-2017*, ISSN. 0126.7906
- Bok, D (1997). *Measuring The Perfurmance Of Government : In Why Peopel Don't Trust Government?* Nye, S Yoseph P.D Zelikow and De King (eds) Cambridge : Harvard University Press.
- Friska Yossi, 2014. *Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion*. Accounting Analysis Journal, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

- Fukuyama, F (1995). *The Social Witness and The Creations Of Prosperity*, New York : Free Press.
- Kramer, R.M and T.R. Taylor (1995). *Trust In Organizations ; Prontiers of Theozy an Research*, Thousan d Oaks, Calif, Sage : New York.
- Lumy Denny George, 2018, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah* Vol.19 No.6. 2018, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.
- Musgrave, Richard A Musgrave, Peggy B. *Public Finance in Theory and Practise*. 1989 Mc Graw Hill Book Company.
- Ocampo (2006). *Congratulatory Message ; The Regional Forum of Reinventing Goverment in Asia* Seoul, Korea.
- OECD 2019, *Government at a Glance 2019* ISSN 2221-4380
- OECD 2017, *Government at a Glance 2017* ISBN 978-92-64-26873-9
- OECD 2015, *Government at a Glance 2015*, ISBN 978-92-64-23347-8
- OECD 2013, *Government at a Glance 2013*, ISBN 978-92-64-20132-3
- OECD 2011, *Government at a Glance 2011*, ISBN 978-92-64-09658-5
- Sari Dian Purnama, 2016 *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu*. *Jurnal Akuntansi*, ISSN 2303-0356 Vol. 6, No.1
- Sari Nita Darma 2003, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Sumatera Selatan*, *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 3 No.2
- Sarjono Nadya, 2018. *Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Dengan Tingkat Kemiskinan Sebagai Variabel Moderasi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, ISSN 20886969, Universitas Pancasila
- Tahwin Muhammad, 2013, *Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah*. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, Vol. 18, No. 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 'YPPI' Rembang